

**PENYALURAN KREDIT PADA PERUM PEGADAIAN
DI JL. T. TAMBUSAI PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan
Studi Pada Program D III Perbankan Syari'ah
Guna Memperoleh Gelar A.Md**



OLEH:

**M. YUSUF
00526001232**

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009**

ABSTRAK

Laporan akhir ini berjudul “ **Penyaluran Kredit Pada Perum Pegadaian Di Jl. T. Tambusai Pekanbaru.**” Sebagaimana kita ketahui bahwa Perum Pegadaian merupakan perusahaan jasa milik pemerintah yang memiliki bisnis inti yaitu usaha gadai yang memberikan kredit gadai kepada masyarakat menengah kebawah di Indonesia.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga permasalahan. Pertama, barang-barang apa saja yang dapat digadaikan di Perum Pegadaian Jl. T. Tambusai Pekanbaru. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi penyaluran kredit di Jl. T. Tambusai Pekanbaru. Yang ketiga, bagaimana analisa perkreditan pada Perum Pegadaian di Jl. T. Tambusai Pekanbaru.

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Pekanbaru, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyaluran kredit pada Perum Pegadaian, dan untuk mengetahui bagaimana analisa perkreditan pada Perum Pegadaian di Jl. T. Tambusai Pekanbaru.

Dalam penyelesaian laporan akhir ini, penulis mengumpulkan buku-buku atau data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah melakukan penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya Kredit Perum Pegadaian sangat membantu masyarakat yang memerlukan dana atau uang untuk memenuhi perekonomian masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENYALURAN KREDIT	
A. Pengertian Kredit	11
B. Unsur-Unsur Kredit.....	12
C. Tujuan dan Fungsi Kredit	13
D. Manfaat Kredit	15
E. Jenis-Jenis Kredit	17
F. Jaminan Kredit	20
BAB III GAMBARAN UMUM TENTAN PERUM PEGADAIAN JL. T. TAMBUSAI	
A. Sejarah Perum Pegadaian.....	23
B. Visi dan Misi Perum Pegadaian	29
C. Program Kegiatan.....	30
D. Prinsip Kerja Perum Pegadaian.....	31
E. Tujuan dan Saran yang Ingin di Capai.....	32

**BAB IV PENYALURAN KREDIT PADA PERUM PEGADAIAN
DI JL. T. TAMBUSAI PEKANBARU**

A. Penyaluran Kredit Pada Perum Pegadaian	33
B. Apa Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perum Pegadaian	34
C. Bagaimana Analisa Kredit Perum Pegadaian	37

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata kredit bukanlah hal yang asing dalam masyarakat, tetapi merupakan istilah yang sangat populer, baik dikalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Terjadinya hubungan perkreditan pada hakekatnya timbul sejak manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya dan tidak dapat secara langsung menukar baran atau jasa yang dibutuhkannya dengan barang, jasa atau alat penukar yang dimilikinya.

Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau persepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹

Kegiatan perkreditan dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia. Dengan semakin majunya perekonomian di masyarakat, maka kegiatan perkreditan semakin mendesak kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara tunai. Kegiatan perkreditan ini meliputi semua aspek ekonomi baik dibidang produk, distribusi, konsumsi, perdagangan, investasi maupun bidang jasa dalam bentuk uang tunai, barang dan jasa.

2. ¹Rachmad Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Cet. ke-2 hal.

Kegiatan perekonomian Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendataan yang seimbang, kemudian masyarakat berbondong-bondong mencari kredit pada bank yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Tapi kenyataannya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit.

Beberapa bulan yang lalu ada kejadian nasabah yang kehilangan Surat Bukti Kredit (S.B.K) yaitu, ada seorang ibu rumah tangga yang kehilangan surat bukti kredit nya karena ibu tersebut ingin menebus barang perhiasan, dan ibu ini menanyai kepada karyawan pegadaian yaitu bagian penaksir bagaimana caranya ibu bisa menebus barang ibu tersebut, sementara itu surat bukti kredit ibu hilang, kemudian karyawan pegandaian menjawabnya. Apabila surat bukti kredit ibu hilang, ibu harus melapor ke kantor polisi dulu untuk minta surat keterangan (hilang) setelah dapat surat tersebut, ibu bawa ke pegadaian dan pihak pegadaian akan membuat duplikat dari surat bukti kredit yang hilang tersebut untuk penebusan barang.

Perum Pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya. Perum Pegadaian meningkatkan peranannya dalam penyaluran pinjaman bagi masyarakat. Nasabah perum pegadaian terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang kurang mendapat pelayanan dari lembaga

keuangan atau perbankan, sehingga masyarakat menengah kebawah memerlukan pinjaman secara mudah dan cepat.

Berpijak dari kenyataan, perum pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit, baik skala kecil maupun skala besar, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan aman. Dalam kenyataan menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang mudah, cepat dan aman memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah. Kemudahan dan kesederhanaan dalam prosedur memperoleh kredit merupakan modal dasar dalam mendekati pangsa pasar pegadaian.²

Perum pegadaian adalah salah satu lembaga pemerintah yang bergerak dibidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, dengan jaminan barang bergerak. Sebagai lembaga jasa keuangan (kredit) yang merupakan per unit dari aurat nadi perekonomian, hal ini tertuang dalam PP No.10 Tahun 1990, yang mengatur tentang perubahan bentuk perusahaan dari Perusahaan Jawatan (PERJAN), menjadi perusahaan umum (PERUM) Pegadaian.³

Tujuan usaha PERJAN adalah pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan PERUM adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan. Dengan perubahan status hukum, tetapi misi pegadaian tetap memberikan kredit gadai kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah. Setelah perubahan status hukum dan dengan motto "*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*", perum pegadaian benar-benar

²Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet. ke- 2 hal. 70.

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke- 1 hal. 14.

memasyarakat di tengah-tengah ketatnya saing ekonomi. Disamping motto tersebut, tujuan dasar pegadaian adalah memberikan pelayanan yang baik, yaitu usaha untuk memuaskan nasabah (*customer utility*). Dengan kepuasan nasabah, diharapkan akan tercipta nasabah yang royal, sehingga dapat mendorong meningkatnya omset perusahaan.

Omset dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan perusahaan yang bersangkutan, apakah semakin maju atau berkembang, jika semakin menurun omsetnya maka cabang atau perusahaan tersebut tidak akan mencapai sasaran atau misinya. Dalam hal ini, pegadaian berkesempatan mengambil peluang yang ada, guna meningkatkan jumlah penyaluran kredit (omset). Upaya-upaya yang dilakukan adalah menggarap potensi pangsa pasar baru dan menaikkan standar taksiran.

Beberapa tahun akhir ini jumlah nasabah pada PERUM Pegadaian di jl. T. Tambusai Pekanbaru mengalami perkembangan/ peningkatan, dan nasabah tersebut berasal dari berbagai kalangan, diantaranya PNS, swasta, dan ibu rumah tangga. Selain itu, Perum Pegadaian membagi pinjaman yang diberikan menjadi 4 golongan berdasarkan jumlah pinjaman, masing-masing pinjaman memiliki suku bunga/ sewa modal yang berbeda-beda mulai dari 1,25%-1,75%. Dalam hal ini Perum Pegadaian menetapkan perhitungan setiap 15 hari.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjelaskan Undang-Undang sebagaimana semestinya. Pegadaian sebagai Badan Usaha

Milik Negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai (KUH Perdata Pasal 1150-1160, Pandhuise No. 81/ 1982 dan PP 10 Tahun 1990) dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis. Pegadaian dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” diharapkan mampu mengatasi kesulitan masyarakat dalam hal kredit dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian dengan bekal semangat kerja keras dan memiliki elemen kunci sukses bagi perusahaan jasa gadai yaitu banyaknya outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dengan di dukung sumber daya manusia yang berdikasi tinggi, kondisi ini menjanjikan perusahaan mencapai visi yang diharapkan menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif.⁴

Ada pun tugas mereka yaitu untuk meningkatkan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan kini menempati hal paling mendasar dalam mengembangkan perusahaan. Bagaimana cara meningkatkan dan cara mengukurnya. Paling tidak ada tiga alasan yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan yaitu:

1. Adalah tingkat persaingan yang semakin ketat dan meningkat. Apabila persaingan pada suatu industri sudah semakin kompetitif (*read ocean zone*) dimana persaingan bukan hanya dengan industri yang sama, tetapi juga dengan industri substitutif, dalam iklim seperti ini pelanggan relatif

⁴Frianto Pandi, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet. ke- 2 hal. 70.

lebih muda ke perusahaan pesaing. Perpindahan ke perusahaan pesaing ini erat hubungannya dengan tingkat kepuasan terhadap produk suatu perusahaan baik barang maupun jasa. Oleh karena itu sangat logis sekali apabila manajemen perusahaan berkeinginan untuk melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan dengan tujuan untuk berupaya mempertahankan pelanggan dari perusahaan pesaing.

2. Semakin besar *investasi* dan *resources* yang dicurahkan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan program kepuasan pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dihadapkan kepada risiko dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan.
3. Adalah harapan (*ekspektasi*) pelanggan yang semakin tinggi, yang berubah dari waktu ke waktu apalagi kemudahan akses informasi suatu produk baik barang maupun jasa sangat mudah untuk di dapat sehingga menempatkan pelanggan untuk mempunyai daya tawar (*bargaining power*) yang tinggi serta kondisi pasar yang beralih dari pasar penjual (*seller market*) menjadi pasar pembeli (*buyer market*), maka suatu hal yang wajar bila kemudian perusahaan berkeinginan untuk melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Untuk mengetahui apa menjadi harapan-harapan pelanggan terhadap produk atau kualitas pelayanan suatu produk dapat dilakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelanggannya sendiri, sehingga dapat mengetahui seberapa kekuatan atas produk atau kekuatan atas kualitas produk, dan sejauh mana tingkat loyalitas pelanggan.

Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka penulis tertarik meneliti masalah ini dengan judul **“PENYALURAN KREDIT PADA PERUM PEGADAIAN DI JL. T. TAMBUSAI PEKANBARU”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada Penyaluran Kredit Pada Perum Pegadaian di Jl. T. Tambusai Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penyaluran kredit pada Perum Pegadaian di jl. T. Tambusai Pekanbaru?
- b. Apa faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit Perum Pegadaian?
- c. Bagaimana analisa perkreditan Perum Pegadaian Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran kredit pada Perum Pegadaian di jl. T. Tambusai Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit Perum Pegadaian.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisa perkreditan Perum Pegadaian Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Perum Pegadaian

Lebih dikenal masyarakat luas bukan hanya tempat meminjam uang tetapi lebih luas lagi yaitu meningkatkan perekonomian.

b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study pada program D3 Perbankan Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru.

c. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Penyaluran Kredit Pada Perum Pegadaian Pekanbaru.

d. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah kepustakaan.

E. Metode Penelitian

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan menjadi objek penelitian adalah Penyaluran Kredit Pada Perum Pegadaian di Jl. T. Tambusai Pekanbaru.

2. Sumber Data

Sumberdata dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan pembahasan penelitian. Serta penulis mengambil data dari informasi yang penulis dapat dari internet yang sesuai dengan penelitian penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

- Data Primer

Yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden, yang menjadi sumber data dari data primer adalah nasabah pengusaha kecil pada Perum Pegadaian.

- Wawancara

Pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (interview) secara langsung dan terarah kepada nasabah dan karyawan Perum Pegadaian.

- Abservasi

Yaitu mengamati secara langsung terhadap objek dan situasi di lokasi penelitian agar memperoleh gambaran nyata tentang masalah yang diteliti guna mendapatkan data dan informasi yang akurat.

- Dokumentasi

Adalah penelitian yang dilakukan pada kantor Perum Pegadaian di Jl. T. Tambusai Pekanbaru.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dan buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

4. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa data deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dan dilakukan penganalisaan secara kualitatif, lalu digambarkan dengan kata-kata.

5. Metode Penulisan

- a. Metode deduktif, yaitu penulisan menggunakan kaidah-kaidah pendapat yang bersifat umum, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu penulisan menggunakan fakta-fakta yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENYALURAN KREDIT

Pada bab ini berisikan tentang pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit. manfaat kredit dan jaminan kredit

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERUM PEGADAIAN

JL. T. TAMBUSAI

Dalam bab ini membahas sejarah pegadaian, visi dan misi pegadaian, program kegiatan, prinsip kerja perum pegadaian serta tujuan dan saran yang ingin dicapai.

BAB IV PENYALURAN KREDIT PADA PERUM PEGADAIAN DI

JL. T. TAMBUSAI.

Dalam bab ini bagaimana penyaluran kredit pada perum pegadaian, apa faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perum pegadaian dan bagaimana analisa perkreditan perum pegadaian Pekanbaru.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutupan yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENYALURAN KREDIT

A. Pengertian Kredit dan Pembiayaan

Dewasa ini kredit merupakan perkataan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita, tidak saja dikenal oleh masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat desa. Kata kredit tersebut sudah sangat populer dikalangan masyarakat disebabkan karena manusia adalah *Homo Economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-cita. Bantuan dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan/ *truth* atau *faith*. Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau badan yang memberikan kredit pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa.¹

Pengetian kredit menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 17 ayat 11, *adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau persepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi*

¹Maya Aryanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Cet. Ke-2, hal. 2.

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

B. Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Subyek dari kredit yaitu:

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki modal dalam bentuk uang, barang atau jasa (bank atau lembaga keuangan lainnya) yang bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan. Orang atau badan lain pemilik modal tersebut lazim disebut *kreditur* (pemberi kredit).

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Cet. ke-3, hall. 96.

- b. Adanya orang atau badan yang membutuhkan/ meminjam modal berupa uang, barang atau jasa. Orang tau badan tersebut lazim disebut *debitur* (penerima kredit).³
2. Adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditur terhadap debitur.
3. Adanya janji dan kesanggupan membayar utang dari debitur kepada kreditur.
4. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan pinjaman uang, barang atau jasa oleh kreditur pada saat penyerahan kembali utang dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti tersebut diatas.
6. Adanya bunga yang harus menjadi beban debitur.

C. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.⁴

Dalam praktiknya tujuan pemberian usaha kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan.

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh

³Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), Cet. ke-2, hal. 1.

⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Cet. ke-2, hal. 105.

bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah.

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dan tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah.

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang.

Adapun fungsi kredit antara lain sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang tidak digunakan (*idle*) dari golongan masyarakat yang berlebih dananya kepada golongan masyarakat yang kekurangan dana. Misalnya, bank memiliki produk tabungan dan deposito untuk menampung simpanan dana dari masyarakat yang berlebih dananya. Dari dana simpanan tersebut bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit.
3. Kredit mengeluarkan pilihan alat lalu lintas pembayaran yang baru selain uang, karena orang debitur dapat menarik dana atau melakukan pembayaran dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perintah pembayaran yang lain.
4. Kredit sebagai pengendali harga, dalam hal andai kata ada peluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan

jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat sesuai dengan rumus *Fisher Equation* yang menyatakan bahwa uang beredar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap harga: $MV=PT$, dimana M; Jumlah uang yang beredar, V; kecepatan laju edar, P; tingkat harga, T; jumlah barang jasa yang diperdagangkan.⁵

5. Kredit dapat meningkatkan potensi ekonomi yang ada di masyarakat sebagai tambahan modal bagi segala kalangan yang berkecimpung di dalam dunia usaha, mulai dari petani sampai dengan pengusaha.

D. Manfaat Kredit

Manfaat kredit dilihat dari pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Manfaat kredit bagi debitur, yaitu;
 - a) Untuk meningkatkan usahanya, dengan kredit debitur dapat meningkatkan pengadaan atau peningkatan faktor-faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia, peluasan pasar, sumber daya alam dan teknologi.
 - b) Dengan memperoleh kredit bank, maka secara tidak langsung akan meningkatkan bonafiditas perusahaan sehingga debitur dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelayanan fasilitas perbankan yang lainnya.

⁵Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-3, hal. 106.

- c) Bank akan menjaga privasi atau kerahasiaan nasabah.
 - d) Dalam meningkatkan usahanya, maka jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Manfaat kredit bagi bank, antara lain;
- a) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur, sehingga akan meningkatkan laba bank.
 - b) Dengan penyaluran kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk pelayanan perbankan yang lainnya.
 - c) Bank memperoleh keuntungan dibidang sumber daya manusia khususnya dalam dunia kredit perbankan, sehingga dimasa yang akan datang memiliki tenaga-tenaga perkreditan yang berkualitas.⁶
3. Manfaat kredit bagi pemerintah atau negara, antar lain;
- a) Kredit bank dapat dipakai sebagai alat untuk mendorong laju perekonomian nasional.
 - b) Kredit dapat dijadikan alat pengendali moneter.
 - c) Kredit dapat meningkatkan lapangan usaha atau pekerjaan.
 - d) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapat.
 - e) Dapat meningkatkan pendapatan negara mulai dari pajak bunga.
4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas, antara lain;
- a) Dengan adanya kredit akan meningkatkan perluasan lapangan pekerja sehingga akan mengurangi pengangguran.

⁶*Ibid.*

- b) Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya sebagai konsultan kredit dan lain-lain.

E. Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan Dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain: ⁷

a. Dilihat dari segi tujuan kredit

- 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung kepada manusia. Sebagai contoh adalah kredit yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, perhiasan, kendaraan, dan rumah.
- 2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif yang dapat meningkatkan faedah atau kegunaan, misalnya untuk investasi, modal kerja, dan likuiditas.

⁷*Ibid*

b. Kredit ditinjau dari materi yang dialihkan haknya

- 1) Kredit dalam bentuk uang, dan;
- 2) Kredit dalam bentuk bukan uang, misalnya barang-barang atau jasa yang biasanya dinerikan oleh perusahaan dagang dan sebagainya.

c. Kredit ditinjau dari cara pencairannya

- 1) Kredit tunai, yaitu kredit yang pencairannya dilakukan secara tunai (cash credit).
- 2) Kredit tidak tunai (non-cash kredit), yaitu kredit yang pencairannya dilakukan tidak langsung pada saat penandatanganan perjanjian, namun dilakukan menurut tenggang waktu yang telah disepakati.
- 3) *Letter of Kredit (L/C)*, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank pembuka (opening bank) atas permintaan pembeli (importir) untuk diteruskan kepada penjual (ekportir) melalui bank koresponden (bank di negara ekportir) sebagai suatu penjaminan dari pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkan kepada pembeli.⁸

d. Dilihat dari segi jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

⁸*Ibid*

- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.⁹
- e. Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali
- 1) Kredit sekaligus, yaitu kredit yang cara penarikannya dilakukan secara sekaligus, baik secara tunai ataupun melalui pemindah bukuan ke rekening debitur.
 - 2) Kredit rekening koran, yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindah bukuan, kedalam rekening koran/ rekening giro atas nama debitur, sedang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek bilyet giro atau perintah penarikan yang lainnya.
 - 3) Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2,3 atau 4 kali tahapan.
 - 4) Kredit berulang (*revolving kredit*), yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan dalam jangka waktu tertentu.
 - 5) Kredit per-transaksi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.
- f. Kredit menurut sektor ekonominya
- 1) Kredit untuk sektor pertanian, yaitu kredit untuk membiayai peningkatan produktifitas petani.

⁹Martono, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), Cet. ke-2, hal. 381.

- 2) Kredit untuk sektor penambangan, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang.
- 3) Kredit sektor perindustrian, kredit untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan mengubah bentuk, meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan.
- 4) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usah-usaha pengadaan dan pendistribusian listrik, gas dan air.
- 5) Kredit untuk sektor konstruksi, yaitu kredit yang diberikan kepada para kontrak untuk pembiayaan pembangunan gedung, renovasi, dan lain sebagainya.
- 6) Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, yaitu kredit untuk investasi ataupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum.

F. Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apa pun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban

sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh mengembalikan kredit yang diambalnya.¹⁰

Seperti sudah dibahas di atas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

1. Kredit Dengan Jaminan

a. Jaminan benda berwujud.

Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan bermotor
- Mesin-mesin/ peralatan
- Barang dagang dan
- Tanaman/ kebun/ sawah

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:

- Sertifikat saham
- Sertifikat obligasi
- Sertifikat tanah

¹⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Cet. ke-2, hal. 113.

- Sertifikat deposito
- Rekening tabungan yang dibekukan
- Rekening giro yang dibekukan
- Promes dan
- Wesel

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.¹¹

¹¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-2, hal. 114.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG PERUM PEGADAIAN
JL. T. TAMBUSAI

A. Sejarah Singkat Perum Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika Vereenigde Oos Indische Companie (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Imhoff. Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada dibawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jendral Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain dan sebagian perabot rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat.¹

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Gubernur Jendral Thomas Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan Bank Van Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan

¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke- 3, hal. 9.

ijin (*lecentie*) dari pemerintah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia(1816) pemerintah Belanda melihat bahwa pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin oleh De Wolf van Westerrode pada tahun 1900 disarankan agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada perinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang ini maka didirikanlah Pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya setiap tanggal 1 April sebagai hari ulang tahun Pegadaian.²

Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian dikelola oleh Pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP. No. 10/1990 (yang diperbaharui

²Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Cet. ke-2, hal. 70-71.

dengan PP. No. 103/2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Adapun Tujuan Perum Pegadaian, yaitu:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai KUHP buku ke-2 Pasal 1150-1160 dan tentang benda bergerak Pasal 509-518.
2. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Berdasarkan hal di atas, lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang mudah di dapat pula. Hal ini, membuat lembaga pegadaian diminati oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, lembaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

Soal kemudahan, prosedur pencairan uang pinjam sangat sederhana di Perum Pegadaian, yaitu seseorang datang ke kantor pegadaian, langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan digadaikan, serta memperlihatkan identitas diri berupa kartu tanda pengenal (KTP) atau surat kuasa apabila barang yang akan digadaikan bukan milik pembawa agunan. Demikian pula bila seseorang ingin melunasi pinjamannya.

Selain itu, Perum Pegadaian juga menyediakan jasa lain di luar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran. Jasa titipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, dan surat berharga. Jasa taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat yang awam.

Perum Pegadaian sudah seratus tahun lebih hadir di kancah keuangan Indonesia. Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal Perum Pegadaian. Perum Pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan persyaratan mudah dan sistemnya tidak rumit/ sulit. Oleh karena itu, bila seseorang membutuhkan dana di pegadain, maka hanya membawa agunan dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, maka seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut.³

Sejak pegadaian berdiri pada tahun 1901, perusahaan yang bernaung di bawah Departemen Keuangan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis semata, namun dituntut pula menjalankan misi sosial sebagai lembaga yang menjadi sandaran warga masyarakat di kala “susah”. Hal itu menunjukkan bahwa mengapa Perum Pegadaian memiliki kebijakan pinjaman dalam tentang nilai dari Rp5.000,00 sampai Rp20 juta/ surat gadai. Perhitungan

³*Ibid*

bunga diberlakukan setiap 15 hari. Karena itu, orang yang menerima uang sebesar Rp40.000,00 dari pegadaian hanya membayar pokok plus bunga pinjaman 1,25% dan bila bisa menebus barangnya sebelum masa 15 hari.

Apabila memperhatikan sejarah Pegadaian maka ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Perum Pegadaian mengubah status pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hal itu berarti Pegadaian ditetapkan sebagai Badan Usaha Tunggal di Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diberi wewenangan untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang bertujuan:

1. Menunjang program pemerintah di bidang ekonomi atas dasar hukum gadai.
2. Mencejagah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 dimaksud, diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Pegadaian. Aturan dimaksud, yang menandai kedinamisan ruang gerak Pegadaian dalam menjalankan usaha dalam status masih sebagai Perusahaan Umum dengan mengemban misi, yaitu:

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.⁴

Pengertian gadai adalah satu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan itu dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.

Kepengurusan dan kelembagaan Perum Pegadaian memiliki 4 orang direksi yang terdiri dari satu direktur utama dan 3 orang direktur yang masing-masing membawahi bidang keuangan, bidang operasional dan pengembangan, dan Bidang Umum. Dalam menjalankan tugas rutin di kantor pusat, direksi dibantu oleh 9 subdirektorat (subdit) yang masing-masing memiliki rincian tugas sesuai bidangnya. Untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Perum Pegadaian memiliki Balai Diklat yang langsung berada di bawah direksi selain pengawas intern.⁵

Kegiatan operasional Perum Pegadaian dilaksanakan melalui Kantor Cabang (Kanca) yang dikoordinasikan oleh Kantor Daerah (Kanda). Perum

⁴*Ibid*

⁵Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2006), Cet. ke-2, hal. 213.

Pegadaian telah memiliki cabang di 26 provinsi dengan jumlah Kanca sebagai berikut: Tahun 1997 sejumlah 602, Tahun 1998 sejumlah 635, Tahun 1999 sejumlah 645, dengan dikoordinasikan oleh 14 Kantor Daerah.

B. Visi Dan Misi Perum Pegadaian

Perum Pegadaian mempunyai visi dan misi, yaitu:

1. Visi Perum Pegadaian:

Visi perusahaan dirumuskan: “Pegadaian pada tahun 2012 menjadi champion di kredit mikro berbasis gadai”.

2. Misi Perum Pegadaian

Rumusan dari keseluruhan visi dan misi Perusahaan Umum (PERUM)

Pegadaian adalah ikut membantu program pemerintah dalam upaya kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.

C. Program Kegiatan Pegadaian

Mungkin selama ini masyarakat kita hanya mengenal usaha pegadaian secara sepintas saja, yaitu sebagai tempat meminjam uang dengan cara mengadaikan barangnya. Padahal dalam praktiknya di samping usaha meminjam uang Perum Pegadaian juga melakukan usaha lain.

Usaha lain yang dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai riil barang-barang berharga miliknya seperti, emas, intan, berlian, mobil,

televisi, dan barang-barang lainnya, hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya.

2. Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran atau kecurian.
3. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan.
4. Ikut serta dalam usaha tertentu bekerjasama sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam membangun perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem *build*.

Yang jelas bahwa usaha pokok pegadaian merupakan usaha peminjam uang dengan sistem gadai, sedangkan usaha lainnya merupakan usaha penunjang kegiatan pokok Perum Pegadaian.

D. Prinsip Kerja Perum Pegadaian

Menurut Pandu Suharto 1988, beberapa prinsip yang dianut Perum Pegadaian sebagai lembaga perkreditan rakyat (istilah yang dipakai sejak jaman kolonial) menurut Decker (1963) adalah sebagai berikut:⁶

⁶Anoniyus, *Laporan Tahunan Perkembangan Usaha Perum Pegadaian*, (Jakarta: Perum Pegadaian, 2007), Cet. ke-4, hal. 12.

1. Memberikan pelayanan yang mudah dan cepat untuk rakyat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Pada saat sebelum Kemerdekaan di tiap pegadaian disiapkan juru gadai. Juru gadai bertugas membantu nasabah untuk mendapatkan pinjaman, mulai dari pengisian formulir, sampai dengan menghitung uang yang dipinjam dari loket. Selain itu menjadi petugas tetap yang mendampingi kliennya dan jika perlu akan datang dari rumah ke rumah untuk mengingatkan nasabah atas pinjamannya.⁷
2. Menetapkan tingkat bunga berdasarkan kemampuan nasabah. Untuk itu, pegadaian setiap saat akan mengevaluasi kemampuan nasabah untuk membayar pinjamannya. Sekiranya nasabah dinilai mampu membayar pada tingkat bunga tertentu maka tingkat bunga tersebut akan dipertahankan atau bahkan mungkin ditingkatkan.
3. Menetapkan batas pinjaman maksimal berdasarkan taksiran nilai jual maksimal agunan pada waktu batasan akhir pembayaran. Jadi besar pinjaman bervariasi berdasarkan jangka waktu pinjaman.
4. Tidak membatasi tujuan penggunaan pinjaman atau nasabah bebas/ boleh menggunakan pinjaman untuk tujuan apa saja.
5. Pembangunan dan operasionalisasi pegadaian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, dan memperhatikan saran-saran dari pemerintah daerah.

⁷*Ibid*

E. Tujuan Dan Saran Yang Ingin Di Capai

Adapun tujuan dan saran yang ingin dicapai oleh pegadaian yaitu:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya, melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

BAB IV
PENYALURAN KREDIT PADA PERUM PEGADAIAN
DI JL. T. TAMBUSAI PEKANBARU

A. Penyaluran Kredit Pada PERUM Pegadaian

Penyaluran kredit pada pelaksanaan sistem gadai mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai barang jaminan. Oleh karena itu, nasabah yang meminjam uang ke Kantor Cabang Pegadaian, hanya wajib membayar sewa simpan barang.

Harta benda atau barang yang dapat dijadikan anggunan oleh calon peminjam pada kantor pegadaian , yaitu bermacam barang, mulai dari emas, barang elektronik, kendaraan, sampai kain. Pegadaian konvensional dimaksud, nasabah bisa mendapat 90% dari harga taksiran barang. Nilai taksiran pada umumnya 80% dari harga pasar sehingga nasabah hanya mendapat 72% dari harga pasar.¹

Mekanisme pelaksanaan pegadaian BUMN merupakan implementasi dari beberapa konsep yang telah ditetapkan oleh pegadaian tentang jenis barang yang dapat digadaikan:

a. Barang yang Dapat Digadaikan

- Padasarnya, hampir semua barang yang bergerak dapat digadaikan di

¹Bambang Pramono, *Jasa Sewa Simpan Barang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cet. ke-2, hal. 45.

pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi:

- Barang perhiasan.
- Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mutiara.
- Kendaraan.
- Baran elektronik.

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumberdaya manusia di pegadaian, perlunya meminimalkan risiko yang ditanggung oleh Perum Pegadaian, serta memerhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang-barang yang tidak dapat digadaikan meliputi:

- Binatang ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.
- Hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perum Pegadaian

a. Pendapatan Perum Pegadaian

Tujuan didirikannya Perum Pegadaian adalah mencari laba, laba ini diperoleh bila perusahaan menjalankan aktivitasnya. Aktivitas perusahaan dapat berupa penjualan jasa, penyaluran kredit, pelelangan yang akhirnya akan dijual kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan Perum

Pegadaian. Dengan demikian jenis suatu perusahaan akan bervariasi tergantung dari jenis usaha perusahaan itu sendiri.

Dalam rangka memperoleh keuntungan, perusahaan harus menjualkan hasil produksinya. Pada perusahaan yang menghasilkan barang, sudah tentu penjualan barang merupakan upaya pencapaiannya. Sedangkan pada perusahaan jasa, mereka harus menyerahkan jasa. Aktivitas perusahaan barang atau penyerahan jasa akan dibarengi dengan penerimaan aktiva, baik berupa barang atau aktiva lainnya. Penerimaan uang atau aktiva lainnya sebagai kontraprestasi atas aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa disebut pendapatan.²

Perusahaan Umum Pegadaian (PERUM), selain melayani kepentingan umum, juga bertujuan untuk mendapatkan laba. Pendapatan perum pegadaian berasal dari bunga pelunasan, bunga yang dilelang, uang kelebihan kadaluarsa, jasa taksiran, dan jasa titipan.

b. Jumlah Nasabah

Prosentase terbesar dalam alasan mencari kredit Perum Pegadaian merupakan prospek Perum Pegadaian dalam meningkatkan pendapatannya. Dalam hal ini kinerja Perum Pegadaian dapat mempertahankan agar masyarakat semakin yakin dan percaya bahwa pendapatan Perum Pegadaian dapat meningkatkan pelayanan dengan upaya mengatasi masalah tanpa masalah, yang pada akhirnya akan menambah pendapatan kas itu sendiri.

²Kasmir, *op.cit*, hak. 231-236.

Penawaran didefinisikan sebagai skedul atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarka di pasar pada setiap tingkat harga yang mungkin selama suatu periode tertentu. Hubungan antara jumlah penawaran dan harga juga dapat dinyatakan dalm kurva penawaran, biasanya semakin banyak yang mampu dan bersedia untuk diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Hubungan ini disebut dengan hukum penawaran yaitu bila harga turun maka kuantitas yang ditawarkan akan turun pula.³

c. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu peristiwa moneter yang terjadi di semua negara, termasuk negara kita Indonesia. Pengaruh krisis pada bulan Juli tahun 1997 dampaknya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Sebelum krisis kita melihat bahwa perekonomian Indonesiacendrung stabil. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah (bank sentral) pada saat itu, selain itu karena kondisi politik dan keamanan negara masih terjamin. Dimana nilai rupiah cenderung stabil terhadap nilai mata uang asing dan harga barang-barang juga tidak bergejolak, stabilitas politik, pertahanan dan keamanan juga menjanjikan, selain itu belum banyak kerusakan dan demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan yang dianut pemerintah.

Tingkat inflasi yang sangat tinggi akan menyebabkan ketidak stabilan perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang

³*Ibid*

semakin meningkat. Hal ini akan menurunkan kepercayaan para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia, sehingga perbankan mengalami kesulitan dalam penyaluran kredit. Jadi tingkat inflasi sangat berhubungan negatif terhadap permintaan kredit di Indonesia.

C. Bagaimana Analisis Kredit Perum Pegadaian

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.⁴

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut:

1. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Cet. ke-2, hal. 109-110.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas*. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Codition*

Dalam melihat kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik

sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.⁵

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif.

⁵*Ibid*

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apabila dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. ⁶

⁶ *Ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara umum kebijakan yang ditentukan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Nangka sudah baik, yaitu semua nasabah diberikan kredit sesuai dengan barang jaminan yang diserahkannya, yang sebelumnya telah ditaksir oleh pegawai bagian penaksir sehingga nasabah dapat memperoleh dana segera dalam waktu relatif singkat. Hanya ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan diantaranya barang jaminan sebagian besar harus berupa perhiasan dan nilai taksiran dari barang jaminan tersebut jauh dari harga pasar.
2. Fasilitas kredit pada Perum Pegadaian cukup mudah dan cepat, asal ia WNI, dan yang paling utama calon nasabah tersebut membawa barang jaminan serta dengan jumlah kredit yang diinginkan, dan ia dikatakan sudah layak untuk diberikan kredit.
3. Fungsi dan tujuan kredit yang dilaksanakan oleh perusahaan telah berjalan baik, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat menengah kebawah.

B. Saran

Lebih baik kita memilih Perum Pegadaian karena sudah seratus tahun lebih hadir di kancah keuangan Indonesia. Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal Perum Pegadaian. Perum Pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan persyaratan mudah dan sistemnya tidak rumit/ sulit. Oleh karena itu, bila kita membutuhkan dana di pegadaian, maka hanya membawa agunan dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, maka kita bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymus, *Laporan Tahunan Perkembangan Usaha Perum Pegadaian*. Website. Perum Pegadaian. Jakarta, 2007.
- _____, *Kajian Pemanfaatan Bantuan Perkuatan untuk Usaha Mikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UKM Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta, 2006.
- Pandu Suharto, *Sejarah Lembaga Perkreditan di Indonesia*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Jakarta, 1988.
- Siswoyo, *Evaluasi Peran Perum Pegadaian dalam rangka Ikut Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Thesis)*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung. Bandung, 2001.
- Teuku Syarif, *Program Perkreditan Pemerintah dan Konsepsi Ideal Perkreditan Bagi kelompok Miskin*. Jakarta, 1992.
- Wiryawan, *Kendala dan Keberhasilan Perum Pegadaian dalam Membantu Perekomian Kelompok Masyarakat Miskin*. Harian Republika tanggal 12 Nopember 2002. Jakarta, 2002.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta, Rineka, Erlangga, 1992.
- Jakawasana, Kirbrandoko, *Manajemen Keuangan*, Jakarta, Erlangga, 1992.
- Kantor Pusat Perum Pegadaian, *Tata Buku Pekerjaan Pegadaian*, Jakarta, 1990 .
- Lukman Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Bandung, 1994.
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993.
- Murni Sumarni, dan. Jhon Soeprihanto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta, Liberty, 1995.
- R. Tjitoadminugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Thomas Suyatno HA, Chalik et Aii, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka utama, 1995.
- Ksmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.